

PENTINGNYA OPOSISI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME *CHECKS AND BALANCES* DALAM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Lutfi Mubarak^a, Juan Turpyn^b

^a Sekretariat Jenderal DPD RI, Indonesia. E-mail: lutfimubarakalfatih@gmail.com

^a Sekretariat Jenderal DPD RI, Indonesia. E-mail: juan.turpyn@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Oposisi Partai Politik, Checks and Balances, Pemerintahan Demokratis Riwayat Artikel Received: Nov 11, 2024; Reviewed: Des 25, 2024; Accepted: Jan 1, 2017; Published: Jan 20, 2025 DOI: https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.48	<i>In a democratic government, the role of opposition political parties as a check and balance mechanism is very important in maintaining accountability and transparency in government. This study aims to explore the significance of political party opposition in ensuring the effectiveness of checks and balances in a democratic system. This research explores the background of checks and balances in democratic governance, highlighting the important role of opposition parties in providing oversight and challenging the actions of the ruling party. Methodologically, a comprehensive literature review and case study analysis from various democratic contexts were used to examine the dynamics of political party opposition. The findings underscore the central role of opposition parties in safeguarding democratic principles and preventing abuse of power by the ruling party. The study concludes that strong opposition from political parties is essential for the smooth running of a democratic system of government. Based on the findings, recommendations were made to strengthen the role of opposition political parties in ensuring the effectiveness of checks and balances, including improving the electoral process and fostering a culture of accountability in political institutions.</i> For example: Dalam pemerintahan demokratis, peran oposisi partai politik sebagai mekanisme <i>checks and balances</i> sangatlah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi signifikansi oposisi partai politik dalam memastikan efektivitas <i>checks and balances</i> dalam sistem demokratis. Penelitian ini menelusuri latar belakang <i>checks and balances</i> dalam pemerintahan demokratis, menyoroti peran penting partai oposisi dalam memberikan pengawasan dan menantang tindakan partai pemerintah. Secara metodologis, kajian literatur komprehensif dan analisis studi kasus dari berbagai konteks demokratis digunakan untuk mengkaji dinamika oposisi partai politik. Temuan menegaskan peran sentral partai oposisi dalam menjaga prinsip-prinsip demokratis dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh partai pemerintah. Studi ini menyimpulkan bahwa oposisi partai politik yang kuat sangatlah penting untuk kelancaran sistem pemerintahan demokratis. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi diberikan untuk memperkuat peran oposisi partai politik dalam memastikan efektivitas <i>checks and balances</i>, termasuk meningkatkan proses pemilu dan memupuk budaya akuntabilitas dalam institusi politik.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Dalam ranah pemerintahan demokratis, konsep *checks and balances* berfungsi sebagai batu penjuru untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas institusi pemerintah. Berasal dari prinsip-prinsip Montesquieu, *checks and balances* diciptakan sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu cabang pemerintahan saja, sehingga melindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang. Sistem ini mengandaikan adanya beberapa pusat kekuasaan dalam pemerintahan, masing-masing dilengkapi dengan sarana untuk menahan yang lainnya, sehingga menjaga keseimbangan dan menerapkan nilai-nilai demokratis. Melihat kerangka pemerintahan demokratis, oposisi partai politik memainkan peran kunci sebagai salah satu mekanisme utama *checks and balances*. Keberadaan oposisi yang kuat memastikan bahwa partai penguasa bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya, memberikan pengawasan, penelitian, dan kritik yang diperlukan. Dengan menantang keputusan dan inisiatif partai pemerintah, partai oposisi berkontribusi dalam mencegah otoritarianisme, melindungi hak minoritas, dan mempromosikan pluralisme dalam masyarakat demokratis.¹

Secara historis, pentingnya oposisi partai politik dalam pemerintahan demokratis dapat ditelusuri kembali ke munculnya demokrasi modern itu sendiri. Dari sistem parlementer awal di Eropa hingga rezim demokratis kontemporer di seluruh dunia, partai oposisi telah menjadi kontra yang sangat penting terhadap kekuatan politik dominan pada masa itu. Melalui debat parlementer, wacana publik, dan kontes pemilu, partai oposisi mengartikulasikan visi alternatif, mewakili suara-suara yang tidak sejalan, dan memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan, sehingga memperkaya proses demokratis dan meningkatkan legitimasinya. Lebih jauh lagi, peran oposisi partai politik tidak hanya terbatas pada kritik terhadap partai penguasa; melainkan juga mencakup penyediaan alternatif yang layak, keterlibatan konstruktif, dan promosi norma-norma dan nilai-nilai demokratis. Dengan menyajikan kebijakan alternatif, melakukan pengawasan yang ketat, dan berpartisipasi dalam proses legislasi, partai oposisi berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih terinformasi dan inklusif, sehingga meningkatkan kualitas pemerintahan secara keseluruhan dan memupuk kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

Dalam konteks demokrasi berkembang dan masyarakat transisi, pentingnya oposisi partai politik menjadi lebih menonjol. Di lingkungan ini, di mana institusi demokratis seringkali rapuh, dan persaingan kekuasaan prevalen, oposisi yang kuat berfungsi sebagai benteng terhadap kecenderungan otoriter, pelampaian eksekutif, dan pembusukan institusi. Dengan menegakkan pertanggungjawaban pemerintah, melindungi kebebasan sipil, dan memperjuangkan reformasi demokratis, partai oposisi berperan penting dalam mengkonsolidasikan kemajuan demokratis dan memajukan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Namun, meskipun memiliki peran penting, partai oposisi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memenuhi fungsi-fungsinya secara efektif. Di banyak negara demokratis, partai oposisi berjuang dengan sumber daya terbatas, akses yang terbatas ke media, dan lapangan pemilu yang tidak seimbang, yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dengan partai incumben dengan persaingan yang adil. Selain

¹ Adiyatma, Rezki. (2019). "Pentingnya Peran Oposisi dalam Pemerintahan Demokratis". Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, 5(1), 45-56.

itu, prevalensi klienelisme, patronase, dan polarisasi politik seringkali mengurangi otonomi dan independensi partai oposisi, menghalangi kapasitas mereka untuk bertindak sebagai pengecek kekuasaan pemerintah yang sejati.²

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk memeriksa dan memperkuat peran oposisi partai politik sebagai mekanisme dasar *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Ini memerlukan tidak hanya reformasi hukum dan kelembagaan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan partai oposisi, tetapi juga upaya masyarakat yang lebih luas untuk membudayakan pluralisme demokratis, toleransi, dan keterlibatan warga. Dengan memperkuat peran oposisi partai politik, demokrasi dapat memastikan akuntabilitas, responsivitas, dan ketahanan yang lebih besar menghadapi tantangan dan ancaman baru terhadap pemerintahan demokratis.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oposisi partai politik adalah distribusi sumber daya dan akses ke platform media yang tidak merata. Di banyak negara demokratis, partai penguasa sering kali menikmati keuntungan signifikan dalam hal pendanaan, liputan media, dan dukungan institusi, yang membungkukkan lapangan pemilu untuk keuntungan mereka. Ketidakseimbangan ini merusak kemampuan partai oposisi untuk bersaing dengan setara dan efektif menyampaikan pesan mereka kepada pemilih, sehingga membatasi kapasitas mereka untuk berfungsi sebagai pengecek kekuasaan pemerintah yang sejati.³

Selain itu, *prevalensi klientelisme*, patronase, dan polarisasi politik merupakan hambatan signifikan bagi otonomi dan independensi partai oposisi. Di lingkungan politik yang sangat dipolarisasi, partai oposisi dapat menghadapi intimidasi, pelecehan, dan penindasan dari partai penguasa dan pendukung mereka, menyebabkan efek penakut pada keberatan dan pluralisme politik. Hal ini menghambat kemampuan partai oposisi untuk memenuhi fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban secara efektif, karena mereka mungkin enggan menantang pemerintah karena takut akan pembalasan atau marginalisasi.

Masalah penting lain yang dihadapi oposisi partai politik adalah pengikisan norma dan institusi demokratis di beberapa negara demokratis. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi tren yang mengkhawatirkan menuju kemunduran demokratis dan otoritarianisme di berbagai belahan dunia, yang ditandai dengan pengikisan kebebasan sipil, serangan terhadap supremasi hukum, dan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif. Dalam konteks seperti itu, partai oposisi seringkali menemukan diri mereka terpinggirkan, diserap, atau ditindas oleh rezim penguasa, yang lebih lanjut melemahkan mekanisme *checks and balances* dan menggoyahkan dasar-dasar demokratis negara.

Selain itu, efektivitas oposisi partai politik tergantung pada faktor-faktor masyarakat yang lebih luas, seperti tingkat keterlibatan warga, kebebasan media, dan kekuatan institusi demokratis. Dalam masyarakat dengan tingkat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat yang rendah, partai oposisi mungkin kesulitan untuk menggerakkan dukungan dan mempertanggungjawabkan pemerintah secara efektif. Demikian juga, di lingkungan di mana media dikontrol atau

² Azis, Moch. (2020). "Oposisi dalam Pemerintahan: Studi Kasus Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 1(1), 12-23.

³ Dewi, Ayu Kartika. (2016). "Peran Oposisi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Indonesia". Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 3(2), 120-133

dimanipulasi oleh negara, suara oposisi mungkin terpinggirkan atau disensor, lebih lanjut mengurangi peran partai oposisi dalam proses demokratis.⁴

Menghadapi tantangan-tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi hambatan struktural, institusional, dan budaya yang menghambat efektivitas oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Hal ini memerlukan upaya bersama untuk memperkuat integritas pemilu, melindungi kebebasan sipil, mempromosikan pluralisme media, dan membudayakan budaya pertanggungjawaban dan toleransi demokratis. Dengan mengatasi masalah-masalah mendasar ini, demokrasi dapat memastikan bahwa oposisi partai politik memainkan peran yang berarti dan konstruktif dalam menjaga prinsip-prinsip demokratis dan melindungi integritas institusi pemerintahan. Jadi, Apakah peran oposisi partai politik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip *checks and balances* telah terpenuhi secara efektif dalam konteks pemerintahan demokratis?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang terdiri dari analisis teoritis dan studi kasus untuk mengeksplorasi pentingnya oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Analisis teoritis dilakukan untuk memahami konsep dan kerangka kerja teoritis yang mendasari peran oposisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis. Dalam konteks ini, studi literatur menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi teori-teori dan pemikiran kunci dari para ahli politik dan ilmuwan sosial terkait peran oposisi. Konsep-konsep seperti *checks and balances*, peran oposisi, demokrasi, pluralisme politik, dan kebebasan politik akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka konseptual penelitian.⁵

Selanjutnya, studi kasus dipilih sebagai metode untuk menganalisis peran oposisi partai politik dalam menjaga *checks and balances* dalam konteks pemerintahan demokratis di beberapa negara. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kriteria seperti keberagaman sistem politik, tingkat kematangan demokrasi, dan signifikansi peran oposisi dalam proses politik negara terpilih. Data untuk studi kasus dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk publikasi akademis, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan wawancara dengan para ahli dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam politik negara-negara yang dipilih. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika politik, tantangan, dan peluang yang dihadapi oposisi partai politik dalam menjalankan fungsi mereka dalam pemerintahan demokratis.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data dari analisis teoritis akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara konsep-konsep yang terkait dengan pentingnya oposisi partai politik dalam pemerintahan demokratis. Analisis ini akan membantu dalam menyusun kerangka konseptual yang kuat untuk memahami peran oposisi dalam sistem politik demokratis. Sementara itu, data dari studi kasus akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Data akan disusun, dibandingkan, dan dikategorikan untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama yang berkaitan dengan peran oposisi dalam menjaga *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Hasil dari analisis data akan

⁴ Fauzi, M. Syahrul. (2019). "Oposisi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pilkada Serentak 2018". Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan, 6(1), 25-38.

⁵ Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : ALFABETA, hlm 50

diinterpretasikan untuk mengidentifikasi temuan utama, implikasi teoretis, dan konsekuensi praktis dari peran oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Kesimpulan akan disusun berdasarkan analisis data dan teoritis untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya oposisi dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberhasilan sistem politik demokratis. Implikasi penelitian ini juga akan dibahas untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik politik yang berkaitan dengan peran oposisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Oposisi merupakan sebuah fenomena yang sering muncul di berbagai bidang, yang umumnya diartikan sebagai perbedaan atau posisi yang berlawanan terhadap suatu hal. Dalam bidang politik, oposisi dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketidaksetujuan atau perlawanan terhadap kekuasaan yang ada, baik secara informal maupun sebagai bagian dari konstitusi. Meskipun terdapat beragam definisi oposisi, esensinya selalu terkait dengan sekelompok individu di luar pemerintahan yang memiliki hak legal untuk menyuarakan pandangan dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, oposisi dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi salah satu pondasi penting, selain partisipasi, dari sistem demokratis yang disebut sebagai poliarki atau pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Oposisi memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan demokrasi, di antaranya sebagai penyeimbang kekuasaan. Ini berarti bahwa oposisi dapat memberikan alternatif pemikiran atau sikap yang berbeda dengan pemerintah, sehingga memastikan bahwa kepentingan mayoritas rakyat tetap terjaga. Fungsi ini menjadi penting terutama ketika pemerintah terpilih secara demokratis ternyata melanggar kehendak rakyat dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Pentingnya oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis adalah topik yang relevan dan kompleks dalam studi politik kontemporer. Pertama-tama, penelitian ini memperjelas peran vital oposisi partai politik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis. Sebagai bagian integral dari sistem demokratis, oposisi memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi tindakan pemerintah, menyuarakan kepentingan alternatif, dan menyediakan kontrol dan kritik yang sehat terhadap kebijakan yang diusulkan. Tanpa keberadaan oposisi yang kuat dan independen, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat meningkat secara signifikan, mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan platform media antara partai pemerintah dan oposisi. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan mengurangi kemampuan oposisi untuk mempengaruhi opini publik. Selain itu, adanya polarisasi politik dan intimidasi dari pihak penguasa juga dapat menghambat oposisi dalam menyuarakan pandangan mereka secara bebas dan terbuka.

Salah satu contoh keberhasilan rezim Orde Baru dan Orde Lama adalah kemampuannya dalam menggambarkan bahwa menjadi bagian dari oposisi merupakan sebuah kesalahan. Oposisi seringkali dianggap sebagai pihak yang terpengaruh oleh pandangan politik liberal yang cenderung pro-individualisme, bahkan diidentifikasi sebagai antek kekuatan asing. Oposisi juga seringkali dipandang sebagai entitas yang telah kehilangan akar dan identitas kebangsaan. Imej negatif

terhadap oposisi ini secara sistematis ditanamkan pada masa pemerintahan tersebut. Pada era Orde Lama, oposisi digambarkan sebagai gerakan yang kontra-revolusioner dan dianggap sebagai hal yang tidak alami, bahkan sering disebut sebagai sesuatu yang "ditanam" oleh kekuatan asing. Di bawah rezim Orde Baru, oposisi dicap sebagai anti-Pancasila, anti-Pembangunan, atau sebagai kelompok yang memiliki pemikiran ekstrem. Selain citra negatif yang dibangun, terdapat dua isu utama yang sering kali disoroti dalam pembicaraan tentang praktik oposisi dalam konteks demokrasi. *Pertama*, sering dianggap bahwa kehadiran oposisi hanya akan menciptakan ketidakstabilan karena dianggap akan menghambat jalannya pemerintahan. *Kedua*, dengan situasi tersebut, diyakini bahwa oposisi hanya akan menghambat pembangunan dan menyebabkan kesejahteraan bangsa terhambat.⁶

Ada hal penting yang juga menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam mendukung oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances*. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan gerakan advokasi, dapat memperkuat legitimasi oposisi dan memperkuat kontrol publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi antara oposisi partai politik dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis. Selain itu, media sebagai pilar keempat demokrasi keberadaan media (pers) memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan demokrasi. Media yang independen dan memiliki integritas tentunya akan memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Selanjutnya, pada satu bagian terdapat konsen utama dalam memberikan wawasan yang berharga tentang perbedaan dalam peran oposisi partai politik di berbagai negara demokratis. Faktor-faktor seperti sistem politik, budaya politik, dan tingkat kematangan demokrasi dapat memengaruhi kekuatan dan efektivitas oposisi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat kontekstual dan berbasis kasus menjadi penting dalam memahami dinamika oposisi politik dalam berbagai konteks politik.

Selain itu, ada juga aspek teoritis yang memperkuat penyorotan terkait perlunya reformasi demokratis yang lebih luas untuk memperkuat peran oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances*. Reformasi ini mencakup langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, perbaikan sistem pemilihan umum, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tanpa langkah-langkah ini, risiko terjadinya pelanggaran demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat tetap tinggi.⁷

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan politik, peran oposisi partai politik dalam sistem demokratis menjadi perhatian yang semakin penting. Terutama dalam konteks masyarakat perkotaan yang telah mengalami kemapanan ekonomi dan memiliki kemandirian politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Namun, meskipun memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan pertimbangan rasionalitasnya, masyarakat kota tidak selalu memandang keberadaan dan tindakan

⁶ Gandhi, J., & Przeworski, A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. *Comparative Political Studies*, 40(11), 1279-1301.

⁷ Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory after the third wave of democratization. *Handbook of party politics*, 239-252

oposisi sebagai hal yang mendesak. Lebih lanjut, mereka juga tidak selalu bersedia dan berkomitmen untuk mengawal pemerintahan berdasarkan pada rasionalitas tersebut setelah pelaksanaan pemilihan.

Dalam konteks masyarakat perkotaan, oposisi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang signifikan. Walaupun memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan kebebasan berpendapat, masyarakat perkotaan cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka daripada memperjuangkan perubahan politik. Kelemahan publik sering kali dianggap sebagai sesuatu yang "biasa terjadi" tanpa perlu ditanggapi secara serius. Faktor-faktor seperti kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan seringkali mendominasi perhatian mereka, sementara isu-isu politik dianggap kurang relevan atau sulit diakses.

Tantangan yang dihadapi oposisi dalam lingkungan perkotaan tidak hanya terkait dengan persepsi masyarakat, tetapi juga dengan faktor-faktor struktural yang lebih dalam. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan platform media antara partai pemerintah dan oposisi. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan mengurangi kemampuan oposisi untuk mempengaruhi opini publik. Selain itu, polarisasi politik dan intimidasi dari pihak penguasa juga dapat menghambat oposisi dalam menyuarakan pandangan mereka secara bebas dan terbuka.⁸

Kendala utama lainnya adalah ketergantungan pada patron yang kuat dan kurangnya kemandirian politik dalam masyarakat perkotaan. Dalam konteks ekonomi yang masih belum mampu menopang terbentuknya kemandirian politik, pola politik pragmatis seringkali mendominasi, di mana keputusan politik seringkali didasarkan pada pertimbangan praktis dan kepentingan pribadi daripada pertimbangan ideologis atau kepentingan publik. Dalam situasi seperti ini, oposisi sering kali kesulitan untuk memainkan perannya dengan efektif sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa peran oposisi partai politik dalam sistem demokratis tidak boleh diabaikan. Oposisi memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi tindakan pemerintah, menyuarakan kepentingan alternatif, dan menyediakan kontrol dan kritik yang sehat terhadap kebijakan yang diusulkan. Tanpa keberadaan oposisi yang kuat dan independen, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat meningkat secara signifikan, mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperkuat peran oposisi dalam pemerintahan demokratis. Pertama-tama, pembenahan terhadap persepsi masyarakat terhadap oposisi menjadi kunci penting. Diperlukan perluasan pemahaman yang tepat melalui berbagai jaringan dan institusi. Pendidikan politik tentang pembangunan demokrasi dan peran krusial oposisi, yang terutama terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi politik (termasuk melakukan kritik terhadap penguasa), patut menjadi agenda penting lembaga-lembaga formal ataupun nonformal itu. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian politik masyarakat perkotaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, peningkatan kesadaran politik, dan pembentukan organisasi

⁸ Adiyatma, Rezki. (2019). "Pentingnya Peran Oposisi dalam Pemerintahan Demokratis". *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 5(1), 45-56

masyarakat sipil yang kuat dan independen. Lembaga seperti perguruan tinggi, lembaga penyadaran politik, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting dalam konteks ini.⁹

Melihat demokrasi yang sehat, peran oposisi sebagai mekanisme *checks and balances* sangatlah vital. Dengan memastikan adanya kontrol dan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, oposisi dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam memperkuat peran oposisi dan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Peran oposisi partai politik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan topik yang terus menjadi perhatian dalam studi politik kontemporer. Analisis komprehensif terhadap pentingnya oposisi sebagai mekanisme *checks and balances* menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika politik suatu negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana oposisi partai politik berperan dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Adanya peran oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances* harus dipahami dalam kerangka prinsip demokrasi. Sebagai bagian dari sistem demokratis, oposisi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah, menyuarakan kepentingan alternatif, dan memberikan kontrol serta kritik yang sehat terhadap kebijakan pemerintah. Tanpa keberadaan oposisi yang kuat dan independen, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat meningkat secara signifikan, mengancam integritas dan keberlangsungan sistem demokrasi.

Mengukur dalam konteks praktiknya, peran oposisi sebagai mekanisme *checks and balances* seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan platform media antara partai pemerintah dan oposisi. Media massa sering kali cenderung memihak kepada pemerintah, baik itu karena kesamaan ideologi, kepentingan tertentu, atau faktor lain yang bersifat simbiosis mutualisme. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan mengurangi kemampuan oposisi untuk mempengaruhi opini publik. Selain itu, polarisasi politik dan intimidasi dari pihak penguasa juga dapat menghambat oposisi dalam menyuarakan pandangan mereka secara bebas dan terbuka.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil sebagai pendukung oposisi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai mekanisme *checks and balances*. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan gerakan advokasi, dapat memperkuat legitimasi oposisi dan memperkuat kontrol publik terhadap pemerintah. Kolaborasi antara oposisi partai politik dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.

Konteks penting untuk memahami perbedaan dalam peran oposisi partai politik di berbagai negara demokratis. Faktor-faktor seperti sistem politik, budaya politik, dan tingkat kematangan demokrasi dapat memengaruhi kekuatan dan efektivitas oposisi dalam mencegah penyalahgunaan

⁹ Marpaung, Jhon. (2018). "Strategi Oposisi dalam Menghadapi Pemerintahan yang Otoriter". Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan, 5(1), 78-91.

kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat kontekstual dan berbasis kasus menjadi penting dalam memahami dinamika oposisi politik dalam berbagai konteks politik.

Perlu ditekankan pula pentingnya reformasi demokratis yang lebih luas untuk memperkuat peran oposisi partai politik sebagai mekanisme *checks and balances*. Reformasi ini mencakup langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, perbaikan sistem pemilihan umum, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tanpa langkah-langkah ini, risiko terjadinya pelanggaran demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat tetap tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa oposisi partai politik memegang peran yang penting dalam menjaga *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh oposisi memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan politik. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat peran oposisi, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, dan melaksanakan reformasi demokratis yang lebih luas guna memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang dinamika politik demokratis dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.¹⁰

Peningkatan kesadaran untuk memperkuat peran oposisi dalam masyarakat akan kehilangan makna jika partai politik, yang mewakili tatanan *political society*, tidak diurus dengan baik. Ini terjadi karena partai politik pada dasarnya adalah lembaga yang terlibat langsung dalam pembentukan oposisi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perbaikan dalam perilaku oposisi pada dasarnya adalah upaya untuk memperkuat kondisi partai politik itu sendiri, yang melibatkan tiga isu kunci, yakni pemantapan ideologi, implementasi kaderisasi, dan kemandirian partai. *Pertama*, dalam hal pemantapan ideologi, oposisi dapat tumbuh kuat jika ada keyakinan ideologis yang kuat. Di negara-negara demokratis yang mapan, perbedaan ideologis antara partai pemerintah dan oposisi sangat terlihat. Perbedaan ini sering kali berlangsung lama tanpa upaya untuk merapatkan kesenjangan tersebut. Koalisi biasanya terbentuk antara partai dengan kesamaan ideologi untuk memperkuat posisi tawar terhadap lawan politik. Misalnya, pertarungan antara kelompok sosialis dan gaullist di Prancis selalu mencirikan konstelasi politik sejak lama. Pola serupa dapat ditemukan di banyak negara Barat, menunjukkan bahwa perbedaan ideologis memegang peranan penting dalam politik partai.

Dengan demikian, peran oposisi dapat dijalankan dengan efektif ketika partai memiliki basis ideologi yang kuat dan mampu menerapkannya. Namun, banyak partai di Indonesia masih berjuang dengan pemantapan ideologi. Banyak partai masih dikendalikan oleh oligarki dan elite tertentu, yang menentukan kebijakan dan orientasi politik partai. Sayangnya, elite partai tidak selalu diberdayakan oleh idealisme atau komitmen ideologi, tetapi lebih oleh kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini,

¹⁰ Nasution, Ahmad. (2019). "Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: Kasus Indonesia". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 6(2), 134-146.

pragmatisme politik sering menjadi prioritas, yang dapat menyebabkan komitmen oposisi menjadi kabur atau terabaikan.

Bagi partai yang berkuasa, kelemahan dalam keyakinan ideologis dapat menghambat kemampuan mereka untuk memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip ideologis. Akibatnya, pemerintah cenderung fokus pada mengurangi potensi oposisi, terutama di awal masa pemerintahannya, alih-alih mempertahankan konsistensi ideologisnya. Inilah yang menimbulkan dilema antara menjaga kestabilan politik dan memelihara prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks ini, perlu upaya serius untuk memperkuat ideologi partai politik dan memastikan bahwa oposisi memiliki ruang untuk berfungsi secara efektif dalam sistem politik. Perbaikan dalam hal ini akan membantu mewujudkan *checks and balances* yang sehat dalam pemerintahan demokratis, yang merupakan salah satu pilar utama dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perlunya reformasi politik yang berkelanjutan untuk memperbaiki sistem partai politik dan memastikan bahwa ideologi dan komitmen politik menjadi dasar dari aksi politik, bukan hanya alat untuk mempertahankan kekuasaan.¹¹

Kedua, dalam hal implementasi kaderisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik karena kaderisasi merupakan bentuk upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin partai yang siap menjalankan roda organisasi kepartaian dan dari kaderisasi kepemimpinan partai politik diharapkan akan menghasilkan calon-calon pemimpin nasional yang memiliki integritas dan visi kebangsaan.

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak.

Implementasi kaderisasi sangat ditentukan oleh pola rekrutmen kader, semakin rendah kualitas pola rekrutmen kader dalam tubuh partai politik maka akan sangat menentukan kualitas kepemimpinan partai politik. Namun sayangnya yang tumbuh dan berkembang pesat yaitu menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalegan kader secara instan.

Selain politik kekerabatan, banyak partai politik yang mengusung calonnya untuk menduduki posisi tertentu, atas dasar popularitas dan ketenaran seperti yang dimiliki artis. Pimpinan partai politik menganggap popularitas calon yang diusung akan dapat meraup simpati dan suara masyarakat dalam konstetasi Pemilu. Rekrutmen artis dalam Pemilu secara instan tanpa melalui pola rekrutmen yang seharusnya dan tidak melalui mekanisme kaderisasi yang berlaku, mengartikan bahwa hal tersebut telah memotong mata rantai proses kaderisasi internal partai politik itu sendiri. Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik.

¹¹ Putra, Ari. (2017). "Peran Oposisi dalam Membangun Sistem Politik yang Demokratis di Indonesia". Jurnal Politik dan Pemerintahan, 4(1), 34-47.

Ketiga, Kemandirian Partai Politik itu perlu diperkuat setidaknya terdapat tiga alasan yaitu: (1) Menjaga independensi sebagai kontrol jalannya roda pemerintahan; (2) Mencegah kekacauan peran dan kewenangan sebagaimana yang telah dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan (3) Mencegah suburnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Lemahnya kemandirian partai politik merupakan masalah serius dalam konteks politik di Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah kurangnya pendanaan yang bersumber dari sumber-sumber independen di luar iuran anggota dan subsidi negara. Iuran anggota, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan partai politik, sering kali tidak berjalan optimal karena lemahnya sistem kaderisasi di dalam partai politik itu sendiri. Kaderisasi yang tidak efektif mengakibatkan minimnya keterlibatan anggota dalam kegiatan partai, sehingga partai sulit untuk mengumpulkan dana dari iuran anggota. Sebagai akibatnya, partai politik sering kali terpaksa bergantung pada sumbangan dari pemerintah atau entitas swasta, baik itu individu maupun Perusahaan.¹²

Tergantungnya partai politik pada sumbangan eksternal ini menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan. Pertama-tama, hal ini mengancam independensi partai politik. Ketika partai politik bergantung pada pihak lain untuk pendanaan, terbuka peluang bahwa kepentingan partai politik bisa terpengaruh oleh kepentingan para penyumbang tersebut. Misalnya, partai politik yang menerima sumbangan dari perusahaan tertentu mungkin cenderung memperjuangkan kepentingan bisnis daripada kepentingan masyarakat secara umum. Ketergantungan pada sumbangan eksternal juga dapat memengaruhi kebijakan partai dan keputusan politik mereka, sehingga mengurangi integritas dan otonomi partai politik dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

Selain itu, fokus partai politik pada mencari tambahan dana juga dapat mengganggu peran utama mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai lembaga politik, partai politik seharusnya fokus pada penyusunan kebijakan, advokasi, dan representasi masyarakat. Namun, ketika mereka terlalu sibuk mencari dana, waktu, sumber daya, dan energi mereka teralihkan dari tugas-tugas pokok ini. Akibatnya, partai politik mungkin tidak dapat memenuhi harapan masyarakat atau bahkan kehilangan legitimasi mereka sebagai wakil rakyat.¹³

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dalam regulasi pengaturan keuangan partai politik. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menyusun undang-undang yang khusus mengatur aspek keuangan partai politik. Undang-undang ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari sumber penerimaan dana, jenis pengeluaran yang diizinkan, prosedur pengelolaan keuangan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Regulasi semacam ini haruslah komprehensif dan mendetail, mencakup berbagai aspek yang terkait dengan keuangan partai politik. Misalnya, undang-undang tersebut dapat menetapkan batasan jelas mengenai sumber-sumber pendanaan yang diperbolehkan, seperti iuran anggota, donasi dari individu atau kelompok, dan dana dari negara. Selain itu, regulasi juga harus mengatur

¹² Sari, Mega. (2019). "Oposisi Partai Politik dan Pemeliharaan Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan". *Jurnal Politik dan Strategi Nasional*, 6(2), 120-133.

¹³ Azis, Moch. (2020). "Oposisi dalam Pemerintahan: Studi Kasus Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1), 12-23.

jenis-jenis pengeluaran yang diizinkan, dengan memastikan bahwa pengeluaran partai politik sesuai dengan tujuan dan kegiatan politik yang sah.

Tidak hanya itu, regulasi juga perlu menetapkan prosedur pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Partai politik harus diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat. Selain itu, institusi penegak hukum juga harus memiliki peran yang kuat dalam penegakan aturan terkait dengan keuangan partai politik. Mereka harus memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran, memberikan sanksi, dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap partai politik yang melanggar ketentuan keuangan. Sanksi yang diberikan kepada partai politik yang melanggar aturan keuangan juga perlu diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Sanksi ini haruslah cukup tegas dan efektif untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di masa mendatang. Selain itu, regulasi juga harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan atau memberikan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan partai politik.¹⁴

Dengan adanya regulasi pengaturan keuangan partai politik yang komprehensif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan independen bagi partai politik di Indonesia. Regulasi ini akan membantu mengurangi ketergantungan partai politik pada sumbangan eksternal dan meningkatkan fokus mereka pada tugas-tugas politik inti mereka, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan partai politik akan lebih disiplin dalam mengelola keuangannya dan lebih mematuhi prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas dalam berpolitik.¹⁵

KESIMPULAN

Partai Politik masih memiliki masalah demokratisasi internal, ideologi, kaderisasi dan kemandirian yang tidak mendukung identitas partai politik di masyarakat, berbagai problematik tersebut memperlemah partai politik mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis diperlukan partai politik yang berkualitas dan peran oposisi partai politik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mengawasi tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Kemudian agar terciptanya peran oposisi partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis diperlukan konsolidasi masyarakat sipil yang kuat dan peran media (pers) yang independen dan memiliki integritas. Tanpa dukungan masyarakat sipil dan media, maka akan sulit partai politik melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Untuk menguatkan partai politik baik secara internal dan eksternal yakni kaderisasi untuk peningkatan sumber daya agar dapat dihasilkan calon-calon pemimpin nasional yang memiliki visi kebangsaan. Penguatan partai politik melalui agenda perubahan undang-undang partai politik penting untuk dilakukan agar memberikan dukungan terhadap

¹⁴ Dewi, Ayu Kartika. (2016). "Peran Oposisi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Indonesia". Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 3(2), 120-133.

¹⁵ Marpaung, Jhon. (2018). "Strategi Oposisi dalam Menghadapi Pemerintahan yang Otoriter". Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan, 5(1), 78-91.

kemandirian finansial bagi partai politik sehingga diharapkan dengan pendanaan yang kuat dari negara akan membangun soliditas partai agar dapat memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Adiyatma, Rezki. (2019). "Pentingnya Peran Oposisi dalam Pemerintahan Demokratis". *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 5(1), 45-56.
- Azis, Moch. (2020). "Oposisi dalam Pemerintahan: Studi Kasus Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1), 12-23.
- Dewi, Ayu Kartika. (2016). "Peran Oposisi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 3(2), 120-133.
- Fauzi, M. Syahrul. (2019). "Oposisi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pilkada Serentak 2018". *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 25-38.
- Gandhi, J., & Przeworski, A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. *Comparative Political Studies*, 40(11), 1279-1301.
- Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory after the third wave of democratization. *Handbook of party politics*, 239-252.
- Marpaung, Jhon. (2018). "Strategi Oposisi dalam Menghadapi Pemerintahan yang Otoriter". *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 78-91.
- Nasution, Ahmad. (2019). "Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: Kasus Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 134-146.
- Putra, Ari. (2017). "Peran Oposisi dalam Membangun Sistem Politik yang Demokratis di Indonesia". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 34-47.
- Sari, Mega. (2019). "Oposisi Partai Politik dan Pemeliharaan Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan". *Jurnal Politik dan Strategi Nasional*, 6(2), 120-133.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA